



**LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH  
(LKIP)  
TAHUN 2023**



**BIRO HUKUM**



## KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik ALLAH dan atas rahmat karuniaNYA, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 ini dapat terselesaikan sehingga dapat disampaikan dan dilaporkan kepada Bapak Gubernur Sulawesi Selatan melalui Biro Organisasi mengenai keberhasilan pelaksanaan siklus anggaran yang berjalan selama 1 (satu) tahun untuk mengidentifikasi hasil pelaksanaan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif terkait dalam besaran jumlah atau persentase dari pelaksanaan anggaran serta secara akumulasi adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Penyusunan LKIP ini, merupakan informasi akhir yang menggambarkan kinerja yang telah dicapai oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan dari Hasil Laporan ini akan menjadi Bahan Evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran berikutnya.

Demikian laporan ini dibuat dan disusun, semoga dapat digunakan sebagai media penilaian semua pihak yang nantinya menjadi umpan balik untuk mengevaluasi kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Makassar,

**KEPALA BIRO HUKUM,**



**ABEL RANTE, S.H., M.Si.**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19701113 199803 1 005

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah merupakan suatu sistem pertanggungjawaban kinerja dari setiap unsur penyelenggara pemerintahan yang meliputi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kewenangan pengelolaan sumber daya, kebijakan dan program kerja yang dilaksanakan sesuai rencana strategis yang telah dirumuskan sebelumnya.

LKIP merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Penyusunan LKIP ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara *Review* Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKIP Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Selatan ini sebagai wadah pertanggungjawaban kinerja disusun dengan memperhatikan:

- a. Prinsip lingkup pertanggungjawaban yakni Hal-hal yang dilaporkan harus proporsional dengan lingkup kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dan memuat kegagalan dan keberhasilan.
- b. Prinsip prioritas yakni yang dilaporkan adalah hal-hal penting dan relevan bagi pengambilan keputusan dengan memperhatikan upaya tindak lanjutnya.
- c. Prinsip manfaat yaitu manfaat laporan harus lebih besar daripada biaya penyusunannya dan laporan harus mempunyai manfaat bagi peningkatan pencapaian kinerja.

Dari uraian tersebut di atas, perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan, maka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Selatan yang tercermin dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.

## **1.2. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Organisasi**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perangkat Daerah, Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Selatan merupakan organisasi perangkat daerah yang berada dalam lingkup Sekretariat Daerah Provinsi sebagaimana yang dijabarkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2023, maka kedudukan Biro Hukum adalah merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam lingkup Sekretariat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang hukum.

Tugas pokok Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Selatan adalah *“membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota, bantuan hukum, serta menyelenggarakan pelayanan administratif sesuai pembedangan tugas”*. Uraian tugasnya diatur dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Selatan dipimpin oleh seorang kepala Biro yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur serta secara teknis administratif dibawah pembinaan Sekretaris Daerah.

### 1.3. Sumber Daya Aparatur

Keberhasilan suatu organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat ditentukan oleh adanya sumber daya manusia, yakni sumber daya aparatur yang berkualitas sebagai penggerak roda organisasi yang berpengaruh langsung terhadap kinerja organisasi.

Dalam lingkup Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Selatan telah didukung oleh sumber daya aparatur sampai dengan bulan Desember 2023 sebanyak 43 (empat puluh empat) orang yang terdiri dari 21 (dua puluh satu) orang PNS laki-laki dan 22 (dua puluh dua) orang PNS Perempuan dengan beberapa kualifikasi sebagai berikut:

- a. Berdasarkan pangkat dan golongan terdiri atas:
  - a) Golongan IV sebanyak 5 (lima) orang
  - b) Golongan III sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang
  - c) Golongan II sebanyak 1 (satu) orang
- b. Berdasarkan pendidikan terdiri atas:
  - a) S2 : 14 (empat belas) orang
  - b) S1 : 26 (dua puluh enam) orang
  - c) D3 : 1 (satu) orang
  - d) SMA : 2 (dua) orang

Selain Sumber Daya Manusia Aparatur berstatus PNS, di Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Selatan juga dipekerjakan pegawai Non ASN (tidak tetap) sebanyak 19 (Sembilan belas) orang.

### 1.4. Peran Strategis Organisasi

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, peran strategis Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Selatan dalam mendukung Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai unit kerja:

1. Melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan perumusan kebijakan daerah bidang Pembinaan Hukum Daerah, Peraturan perundang-undangan seperti Pengkajian Peraturan Daerah, Peraturan dan Keputusan Gubernur sehingga

dapat tersusun produk hukum daerah yang responsif dan aspiratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan penelaahan kasus hukum, pemberian advokasi hukum, pendapat hukum, dan pertimbangan hukum kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang berkaitan dengan Bantuan Hukum, sehingga tercipta suasana yang kondusif di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Melaksanakan pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring pelaksanaan urusan ketatausahaan Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Selatan sehingga dapat tercipta organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran.

Dengan menjalankan tugas tersebut, diharapkan akan dapat:

- a) menciptakan perumusan kebijakan daerah yang mendorong percepatan pembangunan melalui produk hukum daerah yang berkualitas dan responsif bagi kesejahteraan masyarakat;
- b) mewujudkan layanan informasi dan bantuan hukum yang prima; dan
- c) mewujudkan penatausahaan Biro Hukum yang menunjang kinerja organisasi Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Selatan.

## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

#### 2.1 Rencana Strategis Organisasi

Perencanaan kinerja Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Selatan mengandung visi, misi, tujuan dan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang realistis yang terkait dengan berbagai dinamika perkembangan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal Provinsi Sulawesi Selatan yang menggambarkan visi pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai gambaran target yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yang disusun dengan memperhatikan Visi berdasarkan RPJMD 2018-2023 dan Renstra 2018-2023.

Rencana kerja Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Renstra Perubahan Setda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 memiliki sasaran kegiatan, indikator kinerja dan target sebagaimana tercantum dalam tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1  
Rencana kerja Biro Hukum

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya tata kelola dan kualitas perumusan kebijakan penyelenggaraan administrasi di bidang hukum	1. Persentase Produk Hukum Daerah Provinsi yang ditetapkan tepat waktu  2. Persentase Permasalahan Hukum yang ditangani	100%  100%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	1. Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah 2. Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik 3. Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan LHP (%)	95%  85%  0% (100%)

## **2.2 Rencana Kinerja**

### **A. Sasaran Kegiatan**

Uraian terkait rencana kerja Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana telah dipaparkan di atas, yang memuat Sasaran kegiatan adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran diurai pula indikator sasaran. Yang dimaksud indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan dan setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaian (target) masing-masing.

Sasaran diupayakan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Sasaran organisasi ditetapkan dengan menggunakan ukuran kuantitatif sehingga pencapaian dapat diukur dengan jelas. Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran terfokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Sasaran organisasi merupakan bagian integrasi dalam proses perencanaan strategis Instansi Pemerintah. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi. Sasaran Biro Hukum ialah meningkatnya tata kelola dan kualitas perumusan kebijakan penyelenggaraan administrasi di bidang hukum.

## **B. Indikator Kinerja**

Dari sasaran tersebut, diuraikan indikator kinerja dari sasaran kegiatan sebagai berikut:

1. Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan, yaitu:
  - Persentase Produk Hukum Daerah yang Difasilitasi dalam Rangka pengharmonisasian produk hukum daerah.
2. Fasilitasi Bantuan Hukum, yaitu:
  - Persentase Masalah Hukum yang Ditangani dan Diselesaikan

Berdasarkan tujuan sasaran kinerja yang telah ditetapkan, langkah selanjutnya adalah menetapkan kebijakan program, kegiatan dan sub kegiatan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut:

- Arah kebijakan yang dilakukan dalam rangka:
  1. Memberikan gambaran obyektif tentang kondisi umum mengenai permasalahan pembentukan produk hukum daerah;
  2. Menetapkan skala prioritas penyusunan rancangan produk hukum daerah untuk jangka panjang, menengah atau jangka pendek sebagai pedoman bersama dalam pembentukan peraturan daerah, peraturan gubernur/keputusan gubernur;
  3. Menyelenggarakan sinergi antar lembaga yang berwenang membentuk produk hukum daerah;
  4. Mempercepat proses pembentukan produk hukum daerah dengan memfokuskan kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah, peraturan gubernur/keputusan gubernur menurut skala prioritas yang ditetapkan;
  5. Menjadi sarana pengendali kegiatan pembentukan produk hukum daerah.

Kebijakan program kegiatan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang telah diurai berdasarkan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas, berikut ini 2 (dua) Program Biro Hukum yang telah ditetapkan dalam Renstra Perubahan Tahun 2018 – 2023 sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
2. Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum.

Untuk kegiatan Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Selatan yang dilaksanakan ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023 adalah sebanyak 9 (sembilan) kegiatan, sebagai berikut:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
8. Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan;
9. Fasilitasi Bantuan Hukum.

Untuk sub kegiatan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang dilaksanakan ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023 adalah sebanyak 21 (dua puluh satu) sub kegiatan, sebagai berikut:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
4. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran;
5. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
6. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan;
7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

8. Fasilitasi Kunjungan Tamu
9. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
10. Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD
11. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
12. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
13. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
14. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
15. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
16. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan
17. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan
18. Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya
19. Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota
20. Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum
21. Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM.

### **2.3 Rencana Anggaran**

Untuk mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja sebagaimana telah ditetapkan diatas, tentunya diperlukan dukungan dana. Pada Anggaran Pokok Tahun 2023, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan mendapatkan anggaran sebesar Rp7.037.670.676,00 (Tujuh Miliar Tiga Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah) yang selanjutnya mengalami perubahan anggaran menjadi Rp23.667.580.048,00 (Dua Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Empat Puluh Delapan Rupiah). Rincian pagu anggaran tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 2.2  
Anggaran Biro Hukum Tahun 2023

NAMA ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		JUMLAH DANA (Rp)
	TOLAK UKUR	TARGET	
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	- Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	95%	<b>2.242.370.608</b>
	- Persentase Penurunan Temuan berdasarkan LHP	0.00 %	
	- Persentase ASN Perangkat daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik	85 %	
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	100 %	<b>30.765.000</b>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaa Perangkat Daerah	2 Dokumen	9.813.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	10.671.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	10.281.000
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Analisis Prognosis anggaran yang telah disusun</b>	2 Dokumen	<b>3.597.800</b>
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	3.597.800
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Rata-rata Nilai Perilaku Pegawai Perangkat Daerah	98 %	<b>170.412.000</b>
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	123.712.000
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	<b>Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan</b>	80 Orang	46.700.000

<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	100%	<b>563.421.600</b>
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	2 Jenis	29.625.300
Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	14.400.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	515.546.600
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	<b>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</b>	4 Dokumen	3.849.700
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	100%	<b>313.748.500</b>
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	55 Unit	313.748.500
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	<b>703.225.708</b>
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<b>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan</b>	1 Laporan	703.225.708
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dalam Kondisi Baik	100%	<b>457.200.000</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	6 Unit	233.950.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 Unit	206.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	30 Unit	17.250.000

<b>PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM</b>	<b>Nilai Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Pada Penataan Peraturan Perundang-undangan</b>	5	<b>21.425.209.440</b>
	<b>Persentase Perkara Hukum yang difasilitasi</b>	100%	
<b>Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan</b>	<b>Persentase Peraturan Daerah yang difasilitasi dalam rangka pengharmonisasian produk hukum daerah</b>	100%	<b>905.191.600</b>
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang disusun	40 Dokumen	401.554.700
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang disusun	600 Dokumen	127.276.900
Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah Produk Hukum yang didokumentasi dan dikelola informasi hukumnya	20 Dokumen	50.607.900
Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang difasilitasi dan dievaluasi	300 Dokumen	325.752.100
<b>Fasilitasi Bantuan Hukum</b>	<b>Persentase Perkara Hukum yang ditangani</b>	100%	<b>20.520.017.840</b>
Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Masalah Hukum Yang ditangani	15 Kasus	20.064.849.140
Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	<b>Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang ditangani</b>	10 Kasus	455.168.700
<b>JUMLAH</b>			<b>23.667.580.048</b>

## 2.4 Dokumen Perjanjian Kinerja

Berdasarkan dari rencana kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, maka ditetapkan pula sebagai dokumen perjanjian kinerja Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2.3

Tabel perjanjian kinerja Kepala Biro Hukum 2023

<b>No.</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya tata kelola dan kualitas perumusan kebijakan penyelenggaraan administrasi di bidang hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Persentase Produk Hukum Daerah Provinsi yang ditetapkan tepat waktu</li><li>2. Persentase Permasalahan Hukum yang ditangani</li></ol>	<p>100%</p> <p>100%</p>
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Biro Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Nilai Sakip Perangkat Daerah</li><li>2. Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah</li><li>3. Persentase Tindak Lanjut Hasil Temua LHP ( temuan Bahan Material)</li></ol>	<p>81</p> <p>99%</p> <p>0,00 (100%)</p>

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1 Metode Pengukuran Pencapaian Kinerja 2023**

Dasar untuk menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan sasaran kegiatan dapat dilakukan dengan metode yang disandingkan dengan indikator keberhasilan berupa masukan. Keluaran, hasil dan dampaknya. Dalam kerangka pengukuran pencapaian kinerja 2023, meliputi pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dengan menggunakan indikator *input* (masukan), *output* (keluaran), dan *outcome* (hasil).

Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja yang telah dilaksanakan pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, maka skala pengukuran kinerja yang digunakan dalam laporan ini ditetapkan sebagai berikut:

- Sangat Tinggi ( $\geq 91$ )
- Tinggi 76 - 90
- Sedang 66 – 75
- Kurang 57 – 65
- Sangat Kurang ( $\leq 50$ )

#### **3.2. Capaian Sasaran**

##### **A. Perbandingan Target dan Realisasi**

Terdapat 2 (dua) program yang dilaksanakan oleh Biro Hukum dengan target dan realisasi pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023

NAMA ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		Realisasi
	TOLAK UKUR	TARGET	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	- Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	95%	95%
	- Persentase Penurunan Temuan berdasarkan LHP	0.00 %	0.00 %
	- Persentase ASN Perangkat daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik	85 %	85 %
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Analisis Prognosis anggaran yang telah disusun</b>	2 Dokumen	2 Dokumen
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Rata-rata Nilai Perilaku Pegawai Perangkat Daerah	98 %	98 %
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	50 Orang
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	<b>Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan</b>	80 Orang	80 Orang

<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	100%	100%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	2 Jenis	2 Jenis
Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	50 Laporan
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	<b>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</b>	4 Dokumen	4 Dokumen
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	100%	100%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	55 Unit	55 Unit
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<b>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan</b>	1 Laporan	1 Laporan
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dalam Kondisi Baik	100%	100%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	6 Unit	6 Unit
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 Unit	2 Unit
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	30 Unit	30 Unit

<b>PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM</b>	<b>Nilai Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Pada Penataan Peraturan Perundang-undangan</b>	5	5
	<b>Persentase Perkara Hukum yang difasilitasi</b>	100%	100%
<b>Fasilitasi Penyusunan Peraturan-Undangan</b>	<b>Persentase Peraturan Daerah yang difasilitasi dalam rangka pengharmonisasian produk hukum daerah</b>	100%	100%
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang disusun	40 Dokumen	40 Dokumen
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang disusun	600 Dokumen	600 Dokumen
Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah Produk Hukum yang didokumentasi dan dikelola informasi hukumnya	20 Dokumen	20 Dokumen
Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang difasilitasi dan dievaluasi	300 Dokumen	300 Dokumen
<b>Fasilitasi Bantuan Hukum</b>	<b>Persentase Perkara Hukum yang ditangani</b>	100%	100%
Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Masalah Hukum Yang ditangani	15 Kasus	15 Kasus
Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang ditangani	10 Kasus	10 Kasus

## B. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Serta Dengan Target Jangka Menengah

Tabel 3.2

Meningkatnya Tata Kelola dan Kualitas perumusan kebijakan penyelenggaraan administrasi di bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah dan Hukum

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI TAHUN 2023	TARGET JANGKA MENENGAH				
				2019	2020	2021	2022	2023
1.	Skor Reformasi Birokrasi Pada Penataan Peraturan Perundang-undangan	-	5	2,4	2,4	3	4	5
2.	Persentase Produk Hukum yang ditetapkan tepat waktu	%	100	10,0	100	100	100	100
3.	Persentase Permasalahan Hukum yang ditangani	%	100	100	100	100	100	100

Tabel 3.3

Akuntabilitas Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI TAHUN 2023	TARGET JANGKA MENENGAH				
				2019	2020	2021	2022	2023
1.	Persentase capaian kinerja Program Perangkat Daerah	%	99%	95 %	95%	96%	96%	97%
2.	Persentase Tindak Lanjut Hasil Temuan LHP (temuan bahan material)	%	0,00 (100%)	0,03	0,02	0,01	0,01	0,00

Target kinerja dan realisasi kinerja 2023 atas perbandingan target kinerja jangka menengah pada Tabel 3.1 dan Tabel 3.2 diatas yang merupakan rujukan dari Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023 dengan skala capaian kinerja sangat baik, atau capaian kinerja 100%.

#### **A. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target dan Solusi Yang Telah Dilakukan**

1. Telah dilakukan analisis mengenai adanya kegagalan pencapaian target sebagai berikut :
  - a. Terbatasnya prasarana dalam menjalankan tugas dan fungsi di Biro Hukum;
  - b. Perlu meningkatkan kapasitas bagi pejabat fungsional maupun pelaksana pada biro hukum;
  - c. Masih rendahnya kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) Biro Hukum yang memiliki kompetensi di bidang hukum sesuai analisis kebutuhan pegawai dan ketersediaan jabatan sesuai peta jabatan pada biro hukum; dan
  - d. Produk Hukum Daerah berdasarkan Program Pembentukan Perda dan Perkada belum semua ditetapkan tepat waktu disebabkan terjadinya keterlambatan pengajuan harmonisasi pada perangkat daerah pengusul.
2. Adapun Keberhasilan dalam pencapaian target, sebagai berikut:
  - a. Menganggarkan dan melakukan penambahan anggaran untuk memenuhi prasarana yang belum terpenuhi;
  - b. Melakukan kegiatan pelatihan dan capacity building untuk seluruh pns biro hukum;
  - c. Melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Selatan untuk melakukan pengisian formasi jabatan pelaksana dan fungsional pada Biro Hukum; dan
  - d. Membangun sistem monitoring dan evaluasi produk hukum lingkup perangkat daerah provinsi sulawesi selatan untuk menciptakan koordinasi antar perangkat daerah yang efektif dan efisien dalam rangka pembentukan produk hukum daerah.

## B. Analisis Program dan Kegiatan Yang Mendukung

Pencapaian kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 dapat dilihat dari 1 (satu) sasaran yang telah ditetapkan melalui pelaksanaan terhadap 2 (dua) program dan 9 (Sembilan) kegiatan 21 (dua puluh satu) sub kegiatan. Akumulasi rata-rata tingkat capaian kinerja sasaran Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Selatan selama Tahun 2023 berada pada skala sangat baik, dengan indikator kinerja utama yaitu:

- a) Persentase Produk Hukum yang ditetapkan tepat waktu.
- b) Persentase Permasalahan Hukum yang ditangani.

Target dan realisasi indikator keberhasilan tercapainya Indikator Kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam bentuk tabel dan diurai dengan penjelasan, sebagai berikut:

Tabel 3.4  
Persentase Produk Hukum yang ditetapkan tepat waktu dan Persentase Permasalahan Hukum yang ditangani

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI TAHUN 2023	CAPAIAN (%)
1.	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang disusun	Dokumen	40	40	100%
2.	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang disusun	Dokumen	600	600	100%
3.	Jumlah Produk Hukum yang didokumentasi dan dikelola informasi hukumnya	Dokumen	20	20	100%
4.	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang difasilitasi dan dievaluasi	Dokumen	300	300	100%
5.	Jumlah Masalah Hukum Yang ditangani	Kasus	15	15	100%
6.	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang ditangani	Kasus	10	10	100%

Berdasarkan tabel 3.8 tersebut di atas pada indikator kinerja angka 1 (satu) adalah Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang disusun. Untuk indikator ini ditargetkan 100%. Pada tahun anggaran 2023 jumlah rancangan Peraturan Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang disusun sebanyak **40 (empat puluh) Dokumen** dengan persentase capaian yang sesuai target sebesar 100%.

Pada Indikator kinerja pada angka 2 (dua) adalah Jumlah Produk Hukum Penetapan yang disusun. Untuk indikator ini ditargetkan 100%. Pada tahun anggaran 2023 jumlah rancangan Produk Hukum Penetapan yang disusun sebanyak **600 (enam ratus) Dokumen** dengan persentase capaian yang sesuai target sebesar 100%.

Pada Indikator angka 3 (tiga) adalah Jumlah Produk Hukum yang didokumentasi dan dikelola informasi hukumnya. Untuk indikator ini ditargetkan 100%. Pada tahun anggaran 2023 jumlah produk hukum daerah yang Didokumentasikan sebanyak **20 (dua puluh) Produk Hukum** dengan persentase capaian yang sesuai target sebesar 100%.

Pada Indikator angka 4 (empat) adalah Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang difasilitasi dan dievaluasi. Untuk indikator ini ditargetkan 100%. Pada tahun anggaran 2023 jumlah produk hukum Kabupaten/Kota yang difasilitasi dan dievaluasi sebanyak **300 (tiga ratus) Peraturan Daerah Kab/Kota** dengan persentase capaian yang sesuai target sebesar 100%.

Pada indikator angka 5 (lima) ini adalah Jumlah Masalah Hukum Yang ditangani Untuk indikator ini ditargetkan 100%. pada tahun anggaran 2023 jumlah perkara yang difasilitasi sebanyak **15 (lima belas) Perkara** dengan Persentase capaian yang sesuai target 100%.

Pada indikator angka 6 (enam) ini adalah Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang ditangani dengan target sebesar 100%, pada tahun anggaran 2023 jumlah perkara non litigasi meliputi pendampingan hukum bagi ASN yang difasilitasi sebanyak **10 (sepuluh) Perkara Pidana** dengan Persentase capaian yang sesuai target 100%.

## C. Realisasi Anggaran

Capaian kinerja pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Biro Hukum Sekeretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan pagu pada dokumen pelaksanaan anggaran pokok dan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

### A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Alokasi anggaran pada program ini sebesar **Rp. 2.242.370.608,00** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 1.937.440.600,00** atau **86,40%** dan realisasi fisik **88,15%** dengan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan **Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.**  
Alokasi anggaran pada Kegiatan ini sebesar **Rp. 30.765.000,00** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 29.616.100,00** atau **96,27%** dan realisasi fisik **98,48%**
- 2) Kegiatan **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.**  
Alokasi anggaran pada Kegiatan ini sebesar **Rp. 3.597.800,00** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 3.359.000,00** atau **93,36%** dan realisasi fisik **100%**
- 3) Kegiatan **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**  
Alokasi anggaran pada Kegiatan ini sebesar **Rp. 170.412.000,00** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 168.065.098,00** atau **98,62%** dan realisasi fisik **100%**
- 4) Kegiatan **Administrasi Umum Perangkat Daerah**  
Alokasi anggaran pada Kegiatan ini sebesar **Rp. 563.421.600,00** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 370.085.165,00** atau **65,69%** dan realisasi fisik **66,84%%**.
- 5) Kegiatan **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**  
anggaran pada Kegiatan ini sebesar **Rp. 313.748.500,00** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 310.152.498,00** atau **98,85%** dan realisasi fisik **100%**
- 6) Kegiatan **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**  
Alokasi anggaran pada Kegiatan ini sebesar **Rp. 703.225.708,00** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 689.837.756,00** atau **98,10%** dan realisasi fisik **100%**

7) Kegiatan **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah**

Alokasi anggaran pada Kegiatan ini sebesar **Rp. 457.200.000,00** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 366.324.983,00** atau **80,12%** dan realisasi fisik **82,87%**

**B. Program Fasilitas dan Koordinasi Hukum**

Alokasi anggaran pada program ini sebesar **Rp. 21.425.209.440,00** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 21.012.414.826,00** atau **98,07%** dan realisasi fisik **98,53%** dengan kegiatan sebagai berikut :

1) Kegiatan **Fasilitas Penyusunan Perundang-Undangan**

Alokasi anggaran pada Kegiatan ini sebesar **Rp. 905.191.600,00** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 698.696.794,00** atau **77,19%** dan realisasi fisik **80,58%**

2) Kegiatan **Fasilitas Bantuan Hukum**

Alokasi anggaran pada Kegiatan ini sebesar **Rp. 20.520.017.840,00** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 20.313.718.032,00** atau **98,99%** dan realisasi fisik **99,32%**

## BAB IV PENUTUP

### 4.1 Simpulan Capaian Kinerja

No.	Sasaran	Capaian	Nilai
(1)	(2)	(4)	
1	Meningkatnya tata kelola dan kualitas perumusan kebijakan penyelenggaraan administrasi di bidang hukum	100%	100%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Biro Hukum	100%	100%
Rata-Rata		100%	Sangat Tinggi

### 4.2 Langkah-Langkah Perbaikan

Sejalan dengan pencapaian kinerja organisasi dengan predikat sangat tinggi dalam arti sasaran yang mencapai target, maka diharapkan pada tahun-tahun mendatang dapat meningkat lagi, dengan langkah langkah:

1. Mendorong upaya peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia aparatur Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang berkualitas atas pemahaman penyusunan produk hukum daerah;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana yang dapat menunjang kinerja Aparatur Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Meningkatkan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) Biro Hukum yang memiliki kompetensi di bidang hukum sesuai analisis kebutuhan pegawai dan kualitas etos kerja SDM Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Makassar,  
**KEPALA BIRO HUKUM,**



**ABEL RANTE, S.H., M.Si**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19701113 199803 1 005